

**Pemikiran 'Effat al-Sharqawi tentang
FILSAFAT SEJARAH KRITIK**

PAPER

**Disusun sebagai Bahan Ajar
untuk Mata Kuliah Filsafat Sejarah I**

oleh:

**Mumuh Muhsin Z.
(Penyunting)**



**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2007**

KATA PENGANTAR

Filsafat Sejarah merupakan subjek kajian yang kurang begitu populer (masih elitis). Salah satu alasannya adalah karena subjek tersebut hampir hanya dipelajari oleh mahasiswa Jurusan Sejarah atau para peminat lainnya yang jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu, bisa dipahami bila jumlah buku Filsafat Sejarah amat sedikit, apalagi yang berbahasa Indonesia.

Untuk sedikit membantu kekurangan sumber bacaan mahasiswa tentang Filsafat Sejarah, maka saya mencoba menyunting sebuah paper tentang Filsafat Sejarah Kritik yang bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa Jurusan Sejarah sebagai sumber bacaan. Suntingan ini terutama bersumber pada buku 'Effat al-Sharqawi (1406 H/1986 M) berjudul *Filsafat Kebudayaan Islam*.

Harapan saya semoga paper ini bermanfaat. Tentu saja saya pun mengharapkan saran dari pengguna demi perbaikan paper ini pada masa-masa mendatang.

Bandung, Juli 2007

Penyunting

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
II. PROBLEM INTERPRETASI SEJARAH	3
III. OBJEKTIVITAS SEJARAH	10
DAFTAR SUMBER	20

I. Pendahuluan

Filsafat Sejarah Kritik, dalam kebudayaan Barat, belum lama timbul. Sebab kebudayaan ini, sebelum abad kesembilan belas, belum lagi mengenal pengamatan penting apa pun mengenai metode penelitian historis seperti yang digambarkan para filosof modern, khususnya para penganut aliran Amerika dan Inggris dalam filsafat sejarah yang menyimpang dari tujuan esensial yang didasarkan atas analisa terinci dan uraian tuntas dari struktur idealistis dan logis pemikiran historis. Berikut ini akan kami kemukakan dua persoalan utama dari persoalan-persoalan yang dihadapi filsafat sejarah kritik, yaitu **problem interpretasi sejarah** dan persoalan **objektivitas sejarawan**.

II. Problem Interpretasi Sejarah

Para penganut aliran kritik dalam filsafat sejarah mengemukakan sejumlah persoalan yang masuk dalam ruang lingkupnya. Di antara persoalan-persoalan ini adalah persoalan interpretasi sejarah yang lebih banyak digeluti daripada persoalan-persoalan lainnya dalam filsafat sejarah. Dalam bidang ini, persoalan yang begitu menarik perhatian para filosof berkisar mengenai keharusan logika interpretasi-interpretasi yang dipandang diterima dalam kajian sejarah untuk tunduk di bawah hukum-hukum yang bersifat umum seperti halnya yang ada dalam penelitian-penelitian ilmu-ilmu fisika. Dengan kata lain, di sini para filosof bertanya: apakah metode ilmu-ilmu fisika bisa diterapkan atas sejarah, sehingga kita bisa mengkaitkan secara kausalitas antara realitas-realitas sejarah dan akibat-akibatnya dengan segala keharusan dan keperluan yang terkandung dalam ide kausalitas?

Di antara para filosof ada yang berpendapat demikian dan memastikan bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam sejarah bisa diramalkan, apabila kita memperhatikan segala kondisi yang mendahuluinya dan meliputinya. Sebab kausalitas logis yang kita pergunakan dalam menginterpretasikan sejarah mampu memberikan kepada kita hukum-hukum umum yang memungkinkan kita untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa depan. Ramalan rasional demikian ini, tentang apa yang

mungkin terjadi di bawah kondisi-kondisi tertentu dalam saat historis tertentu, tidak mungkin terjadi kecuali dengan pengasumsian adanya hukum-hukum umum yang mengendalikan sejarah dan patut untuk diterapkan. Hukum-hukum itu sendiri tidak mungkin dicapai kecuali dengan kajian eksperimental.

Menurut para penganut aliran positif, hukum-hukum umum yang demikian itu, yang bisa meramalkan masa depan, bisa dicapai lewat penundukan penelitian-penelitian sejarah di bawah metode penelitian dalam ilmu pengetahuan, termasuk di antaranya pendasaran dirinya di atas pengamatan. Namun pengamatan di sini tidak harus selalu secara langsung. Sebab gerakan dinamis dari sejarah tidak memungkinkan bagi sejarawan untuk menerapkan metode eksperimental secara penuh. Meski demikian, hal itu telah memberi inspirasi ide tentang perlu ditemukannya hukum-hukum gerakan masyarakat bagi filosof-filosof itu, dan mereka pun meminta para sejarawan untuk meneliti dan menemukan hukum-hukum itu seperti halnya apa yang telah dilakukan para ahli fisika dalam menemukan hukum-hukum gerak benda-benda fisik dan astronomi. Sehingga dengan ini ramalan-ramalan historis pun menjadi sepenuhnya bercorak ilmiah dan ditegakkan di atas landasan-landasan yang dikendalikan oleh hukum ilmiah.

Kausalitas historis ini pun juga dianut oleh materialisme Marxistis. Aliran ini menganut prinsip hubungan legal dari fenomena- fenomena realitas. Menurut para penganut aliran ini, hubungan kausalitas dari fenomena-fenomena sejarah diwarnai dengan corak umum dan segala fenomena alam dan segala perubahan timbul akibat dampak sebab. Oleh karena itu, merupakan hal yang mungkin, pengetahuan tentang hubungan kausalitas yang realistik dipergunakan sebagai landasan kegiatan praktis manusia. "Apabila kita mengetahui sebab-sebab dan mendasarkan diri padanya, merupakan hal yang mungkin kita bisa menciptakan fenomena-fenomena yang dikehendaki masyarakat, menghalangi timbulnya fenomena-fenomena yang mungkin bisa memukulnya atau tidak dikehendakinya, dan berjuang melawan fenomena-fenomena itu". Dari realitas inilah sejarah mendasarkan posisinya, seperti halnya ilmu lainnya, di mana ia menjadikan pengetahuan tentang hukum-hukum persoalan yang dikajinya sebagai fungsi tetapnya. Jadi, sejarah sebagai ilmu

pengetahuan pada waktu mengkaji proses sejarah yang dipersonifikasikan "selalu berupaya menemukan hukum-hukum yang berlaku dalam sejarah masyarakat".

Namun ide hukum umum yang dapat dipergunakan untuk menginterpretasikan peristiwa-peristiwa sejarah ini mendapat labrakan keras dari beberapa filosof sejarah. Argumentasi mereka ialah bahwa setiap peristiwa historis memiliki individualitas khusus, dan sejarah tidak mengulangi dirinya kembali seperti dikatakan banyak orang. Masalahnya karena hukum ini merupakan suatu persoalan yang mengungkapkan hubungan yang tetap antara sejumlah peristiwa sebelumnya, yang dengan sendirinya diikuti peristiwa-peristiwa selanjutnya. Untuk bisa memahami hubungan ini secara lebih gamblang tidak boleh tidak harus dipilah antara peristiwa-peristiwa terdahulu dan peristiwa-peristiwa selanjutnya dari satu segi, dan antara berbagai faktor dan peristiwa lainnya dari segi lain, yang beraneka dan berjaln, sehingga ini sulit direalisasikan dalam bidang penelitian historis. Oleh karena itu, para pengkritik ide hukum umum yang memegangi pendapat relativisme historis berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa bersejarah begitu kompleks dan berjaln sehingga sulit memberlakukan hubungan-hubungan tetap di antara kelompok-kelompoknya seperti yang terjadi dalam ilmu-ilmu fisika. Dari sini mereka menyimpulkan kemustahilan bisa dipastikannya hubungan-hubungan yang tetap antara peristiwa-peristiwa bersejarah di mana akan terjadi akibat setiap kali sebabnya terealisasi. Oleh karena itu, dalam sejarah orang tidak menemukan adanya peristiwa-peristiwa bersejarah yang benar-benar serupa, sebab satu peristiwa bersejarah tidak sama sekali berulang.

Ide determinisme yang konsisten dengan hukum-hukum umum mendapat kritik dari kaum idealis. Mereka berpendapat bahwa apabila alam tunduk di bawah dunia determinisme, maka sejarah adalah dunia kebebasan. Meskipun mereka tidak mengingkari penelitian sejarawan atas faktor-faktor atau sebab-sebab parsial, namun mereka mengingkari bahwa kausalitas dalam sejarah berbeda dengan kausalitas dalam ilmu-ilmu fisika. "Kausalitas sejarah adalah logika internal dari kenyataan-kenyataannya. Sedang lahiriah ilmu-ilmu fisika tidak memiliki batin. Karenanya

kausa mempunyai hubungan lahiriah dengan efek di samping kegunaan deterministisnya. Sedang realitas-realitas sejarah erat kaitannya dengan manusia yang menikmati kebebasan dan tidak tunduk di bawah logika determinisme. Para pendukung idealisme dalam sejarah ini mengemukakan sejumlah contoh yang memungkinkan digambarkannya kecenderungan lain dari realitas-realitas sejarah yang bukan kecenderungan riilnya, dan mengungkapkan individualitas sejarah serta ketidakbiasaan diikhtisarkannya hukum-hukum umum darinya atau diramalkan dengannya. Meski demikian, mereka tidak menyatakan bahwa perjalanan sejarah merupakan rangkaian kebetulan yang tidak bisa dicari kausanya. Mereka lebih banyak berupaya menguraikan kemustahilan diikhtisarkannya hukum-hukum umum yang oleh sejarawan dijadikan sebagai salah satu tujuan kajian historisnya. Oleh karena itu, sejarah harus tetap terikat dengan kategori-kategori khususnya, baik individualitas, ruang dan waktunya yang tertentu. "Kategori-kategori ini tidak bisa diabstraksi atau digeneralisasi. Bila tidak demikian maka peristiwa historis akan kehilangan corak historisnya. Seorang sejarawan tidaklah menulis segala sesuatu yang namanya revolusi dalam pengertian umumnya, tapi ia menulis sejarah revolusi suatu negeri tertentu pada masa tertentu".

Namun ide determinisme historis yang dikemukakan beberapa ahli di bawah pengaruh metode eksperimenal dalam ilmu pengetahuan dan tuntutan kausalitas yang diciptakan hukum ilmiah yang berkaitan dengannya tidak lain adalah paras baru determinisme lama, yaitu **determinisme teologis**. Di antara para filosof Yunani ada yang menganut ide itu, begitu pula para agamawan dalam semua agama. Menurut determinisme teologis ini, semua peristiwa yang terjadi dalam alam ini telah ditetapkan sejak zaman azali, yang tidak bisa ditolak, dan peristiwanya tidak bisa dihindari. Akibat berkembangnya teori ini dalam berbagai agama, timbullah berbagai aliran yang menganut **determinisme historis**. Dalam aliran-aliran yang demikian, ide pemeliharaan Ilahi dan pendapat tentang kebagusan dan yang lebih bagus yang berkaitan dengannya melakukan peran esensial dalam interpretasi rasional atas teori itu. Namun justifikasi teologis ini tidak memberi ruang lingkup yang luas bagi seorang filosof yang tidak mendapat kesempatan untuk berbeda pendapat dengan teori yang pada asas

pertamanya diacu pada sumber-sumber metafisik yang didasarkan pada wahyu atau ilham, dan sejak semula harus menerima pendapat bahwa transfigurasi kehendak Allah, dalam kedudukannya sebagai pelaku dalam sejarah, dan cara terjadinya transfigurasi ini masuk dalam alam yang tanpa akhir dan substansinya tidak bisa dipahami oleh rasio manusia yang terbatas dan hanya mampu merenungkan dampak-dampaknya.

Jelas, para penganut determinisme teologis ini bertindak sebagai pengkritik semua interpretasi historis yang sikapnya ditegakkan di atas ide kausalitas historis dan pendapat tentang hubungan sebab-akibat antara berbagai gejala yang berkaitan dengannya. Tapi dalam hal ini kami tidak akan menguraikan secara terinci berbagai aliran teologis dan sikapnya yang mengkritik teori kausalitas historis. Di sini kami hanya mengemukakan secara ringkas dan setelahnya kita beralih pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan para penganut ide kausalitas historis dalam mengukuhkan aliran mereka mengenai determinasi dan menolak pendapat lawan mereka, baik dari kalangan kaum idealis, teologis, maupun lain-lainnya.

Di antara prinsip-prinsip yang mempengaruhi gerak sejarah, menurut mereka, adalah **ide ras manusia**. Ada beberapa orang di antara mereka yang berpendapat bahwa ada karakteristik tertentu yang dimiliki berbagai bangsa yang mengendalikan tindakan mereka dalam membuat sejarah. Ide ini, pada esensinya, tumbuh dari pandangan-pandangan rasial yang memperoleh jalan ke medan ilmu pengetahuan dan politik. Dalam bidang ini filosof sejarah memandang beberapa ras lebih unggul ketimbang ras-ras lainnya dan mereka beri atribut-atribut tertentu untuk mereka jadikan sebagai landasan hukum-hukum interpretatif atas sejarah. Para filosof Barat penganut ide ini tidak ragu lagi berpendapat bahwa ras Arya adalah ras yang paling unggul, dan ras-ras lainnya kurang mampu dalam membuat sejarah. Pendapat seperti ini, misalnya, dikemukakan oleh Joseph Arthur dan Houston Stewart dalam karya-karya sejarah mereka. Kecenderungan rasial dalam menginterpretasikan sejarah sejak permulaan abad kesembilan belas, mendapat dukungan dari beberapa ilmuwan, antara lain **Gobineau**. Ucapan Gobineau mengenai hal ini: "Kondisi-kondisi ras

itu yang menguasai problema-problem besar dalam sejarah dunia, perbedaan-perbedaan ras bisa dipergunakan untuk menginterpretasikan nasib bangsa-bangsa, di mana ras-ras yang maju mampu meraih kemajuan substansial, sementara ras-ras lainnya, misalnya saja bangsa Indian Amerika, secara sosial dan kultural masih dibatasi oleh warisan rasial mereka. Dengan demikian semua kebudayaan utama merupakan pencapaian ras Arya".

Teori rasial seperti ini secara antropologis tidaklah benar, sebab dalam hal ini tidak ada ras-ras yang unggul dan ras-ras yang inferior. Dengan kata lain, kapasitas-kapasitas manusia tidaklah ditentukan oleh ras dan dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi kapasitas manusia dan gerak sejarah.

Oleh karena itu, teori yang ditegakkan di atas prinsip determinisme rasial hampir tidak memperoleh sambutan riil dalam kalangan para peneliti pada zaman modern ini, setelah berlalunya masa kebanggaan ras yang berpijak pada pendapat bisa diikhtisarkannya sifat-sifat intelektual dan keistimewaan-keistimewaan intelektualitas suatu bangsa yang termasuk ras tertentu, karena para pengkaji dan peneliti mendapatkan bahwa psikologi sosial ternyata lebih sulit dan kompleks ketimbang yang diduga sebelumnya.

Apabila di antara ilmuwan dan filosof ada yang memegang determinisme rasial dalam menginterpretasikan sejarah, di pihak lain di antara mereka ada pula yang menganut determinisme lingkungan geografis dan dampaknya terhadap watak perkembangan historis yang dibatasi oleh kondisi-kondisi geografis di mana suatu kebudayaan tumbuh. Namun pendapat tentang adanya dampak iklim dan kondisi-kondisi alam pada dasarnya bisa ditemukan pula pada masa sebelum zaman modern. Sebelumnya, ada beberapa ilmuwan Muslim yang berpendapat tentang adanya hubungan sebab-akibat antara geografi lingkungan kultural dengan pertumbuhan dan perkembangan tertentu kebudayaan-kebudayaan yang ada seperti akan diuraikan nanti. Pendapat serupa juga dikemukakan **Bodin** pada zaman Renesans, **Montesquieu** pada abad kesembilan belas, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya

pada abad kedua puluh. Meski secara teoretis para ilmuwan itu berbeda pendapat dalam menginterpretasikan hubungan sebab-akibat antara lingkungan geografis dan sejarah, namun mereka semua seiring pendapat mengenai dampak lingkungan geografis atas manusia dan sistem-sistem sosio-politik yang ada serta perkembangan historis dan kultural berbagai bangsa yang erat kaitannya dengan sistem-sistem itu.

Akan tetapi prinsip teoretis ini, yang secara substansial ditegakkan di atas kondisi geografis dalam menginterpretasikan sejarah berdasarkan **hukum kausalitas**, tidaklah mendapat penerimaan secara penuh dari banyak para peneliti yang berpendapat bahwa kondisi memang kadang mempunyai peran dalam menentukan perkembangan historis, sosial, dan kultural suatu bangsa, tapi peran itu sendiri tidak berlaku secara pasti dan membatasinya secara final. Sebab teori ini pada waktu ia diletakkan di bawah pengujian di lapangan tidak menunjukkan bahwa kondisi geografis mengarahkan sejarah dan bukan merupakan faktor positif yang timbul bersama kemanusiaan sejak permulaannya pada masa silam.

Di samping adanya pendapat yang mendasarkan unsur-unsur **ras** dan **lingkungan** dalam menginterpretasikan sejarah secara hukum kausalitas, ada pula pendapat lain yang cukup terkenal yang mendasarkan diri pada **faktor-faktor sosial**. Apabila lingkungan geografis dan rasial dipandang sebagai unsur-unsur yang berada **di luar peristiwa-peristiwa historis**, sebaliknya faktor-faktor sosial berada **di dalam peristiwa-peristiwa itu sendiri**. Acapkali para penganut determinisme sosial ini berupaya mengemukakan satu kausa saja dalam menguraikan berbagai aspek peristiwa-peristiwa historis yang beraneka, baik yang bercorak politis, religius, maupun legal.

Karl Marx dipandang sebagai salah seorang penganut **kecenderungan sosial** dalam menginterpretasikan sejarah. Dengan mengambil **satu kausa** saja, yaitu **sistem ekonomi** yang berkembang dalam suatu masyarakat, ia berupaya menginterpretasikan berbagai sistem kehidupan lainnya yang berkembang dalam masyarakat itu dan hubungan semuanya dengan produksi serta perkembangan deterministik yang diakibatkannya ke arah suatu perkembangan kebudayaan manusia tertentu.

Interpretasi materialistis terhadap sejarah ini, menurut para penganutnya, merupakan ungkapan teoretis satu-satunya tentang proses historis dan hukum-hukum umumnya. Meski demikian, **Engels** dan **Marx** sering menekankan bahwa hendaknya kita tidak memandang pemahaman materialistis terhadap sejarah sebagai metode filsafat sosial dan interpretasi terhadap proses historis dalam semua dimensi dan liku-likunya, tapi hendaknya teori materialisme historis semakin dikembangkan dan diperkaya, bersama-sama dengan perkembangan sejarah sendiri, dan pengetahuan kita tentang gejala-gejala sosial kita perdalam. Mengenai hal ini, ujar Engels, "Pemahaman kita terhadap sejarah, pertama-tama, adalah pengantar jalan ke arah pengkajian dan bukannya merupakan landasan untuk membangun seperti menurut kaum Hegelis. Jadi, merupakan kewajiban kita untuk mulai mengkaji kembali seluruh sejarah".

Namun kesediaan untuk mengembangkan teori itu dari pihak pengasasnya tidaklah sama sekali memperkecil kecenderungan deterministik yang berlebih-lebihan dalam menginterpretasikan sejarah dan kecenderungan yang bercorak tunggal dalam interpretasi ini. Sebab konsepsi materialistis tentang sejarah ditegakkan di atas landasan prinsip tunggal yang pasti, yaitu **sistem-sistem produksi**; kebutuhan-kebutuhan kehidupan material dan tuntutan penyesuaian perjalanan sosial, politik, dan spiritual pada kehidupan secara umum. Dalam pandangan teori historis ini sarana-sarana dan sistem-sistem produksi adalah realitas satu-satunya, sebab seluruh dorongan psikologis dalam gerak sejarah dari dalam ditopang oleh kondisi-kondisi material. Oleh karena itu **sejarah manusia**, menurut mereka, tidak lain adalah **sejarah perjuangan kelas** di semua tempat. Dalam teori materialistis murni demikian ini, yang berpendapat bahwa "produksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik manusia adalah realitas satu-satunya dalam sejarah", tidak akan ada tempat bagi ketuhanan dalam kedudukannya sebagai pembuat sejarah atau pemeliharanya. Malah kehendak manusia sendiri sirna di hadapan logika determinisme tegar ini. Jadi, manusia tidak mempunyai harapan untuk bergerak di luar kerangka perkembangan sejarah yang terbatas seperti ini, seperti halnya menurut interpretasi mereka yang bercorak tunggal, yang mencampuradukkan antara alam kenyataan yang sejarah seperti apa adanya dan alam nilai yang sejarah seperti semestinya serta keinginan untuk

membebasakan kelas-kelas yang tertindas yang erat kaitannya dengan hal itu. Namun interpretasi tunggal demikian ini, yang sikapnya dalam menginterpretasikan sejarah ditegakkan di atas suatu prinsip tertentu seperti ras, lingkungan, sistem ekonomi, atau lain-lainnya, pada zaman modern sekarang tidak mempunyai nilai filosofis besar lagi setelah tampak gamblang bagi banyak pemikir bahwa masalah historis begitu saling berjaln, kompleks, dan bertautan dan bersamanya gugurlah interpretasi mana pun yang didasarkan pada satu prinsip dalam menginterpretasikan berbagai peristiwa. Sebab dalam hal ini ada berbagai peristiwa yang tidak bisa diinterpretasikan karena peristiwa-peristiwa itu terjadi hanya karena kebetulan belaka dan tidak memiliki kausa-kausanya historis yang riil. Selain itu ada berbagai peristiwa yang bertentangan dengan semua ramalan para sejarawan dan analogi-analogi logika mereka tentang sejarah, karena sejarah pertama-tama adalah bidang kebebasan manusia.

III. Objektivitas Sejarawan

Di samping persoalan **interpretasi sejarah** yang menimbulkan problema **hukum-hukum historis umum** dan membangkitkan perbedaan pendapat mengenai kemungkinan diperolehnya hukum-hukum umum itu, ada pula persoalan **objektivitas** dalam penulisan sejarah.

Mengenai hal ini, para peneliti mengemukakan suatu pertanyaan substansial mengenai kemungkinan dipandangnyanya kesimpulan-kesimpulan yang dicapai para sejarawan dalam pengkajian mereka atas berbagai peristiwa historis dan perkembangan-perkembangannya sebagai hal yang objektif seperti halnya kesimpulan-kesimpulan yang dicapai dalam ilmu-ilmu fisika.

Banyak filosof yang menyatakan keraguannya atas hukum-hukum historis demikian itu. Sebab hukum-hukum itu, menurut mereka, tidak lepas dari sikap-sikap **subjektif** penyusun yang erat kaitannya dengan pendapat-pendapatnya tentang **etika** dan **estetika**.

Sebagaimana diketahui, metode-metode penelitian ilmiah memiliki suatu prinsip hendaknya seorang peneliti “tidak terpengaruh oleh teori-teori dan nilai-nilai estetis, etis, dan politis yang dianutnya”. Namun, oleh karena merupakan hal yang sulit, malah mustahil, bagi seorang peneliti untuk melepaskan diri sepenuhnya dari dirinya sendiri dalam suatu kajian historis teoretis seperti penelitian historis, maka banyak kesimpulan yang dicapai para sejarawan biasanya tidak bisa sepenuhnya dipandang ilmiah dalam pengertian yang dipergunakan para peneliti dalam penelitian-penelitian ilmu fisika dan matematika.

Akibat perbedaan pendapat mengenai objektivitas sejarawan, timbullah **teori relativisme** dalam sejarah seperti telah dikemukakan di muka. Hal itu sendiri merupakan salah satu persoalan yang digeluti para filosof sejarah sejak waktu yang dini, di mana mereka meniadakan ide **netralitas mutlak** dalam medan penelitian historis dan mereka mengemukakan bahwa hukum-hukum sejarah bisa menginterpretasikan secara baik apabila hukum-hukum itu dipahami berdasarkan sebagian nilai-nilai estetis dan etis atau apabila hukum-hukum itu diletakkan dalam kerangka bidang budaya yang dibatasi sang peneliti.

Menurut para penganut **relativisme historis**, netralitas penuh dalam pengkajian sejarah merupakan hal yang sulit untuk bisa direalisasikan. Sebab pengetahuan historis, seperti halnya pengetahuan-pengetahuan kemanusiaan lainnya, mengalihkan masukan-masukan langsung pada suatu bahasa lain, menundukkannya pada bentuk-bentuknya, kategori-kategorinya, dan tuntutan-tuntutan khususnya. **Zimmel** misalnya menyatakan bahwa para penulis biografi, misalnya, memilih peristiwa-peristiwa yang dikehendaknya dan menyusunnya secara baru. Hal yang sama juga bisa diterapkan pada semua biografi, perjalanan hidup, dan semua bentuk tulis tentang sejarah. Ini karena sang sejarawan membuat kerangka dan hubungan yang tidak terdapat dalam kenyataan sejarah. Dengan demikian sang sejarawan pun terpaksa mulai memilih unsur-unsur tertentu dari sejarah dengan mendasarkan diri pada interpretasi historis. Pemilihan ini sendiri merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh karakter pengkajian itu. Sebab secara praktis seorang penyusun tidak mungkin bisa membahas semua teks dan peristiwa

yang berkaitan dengan situasi historis dengan perhatian yang sama. **Proses pemilihan** itu sendiri jelas diwarnai oleh berbagai faktor subjektif yang berkaitan dengan pandangan **estetis**, **etis**, dan **filosofis** sang penyusun dan faktor-faktor itu merupakan faktor-faktor subjektif yang tidak bisa dipisahkan dari pandangannya. Hal ini karena realitas-realitas yang dipandang sebagai sejarah selalu membawa corak diri. "Langkah pertama terhadap apa yang kita kenal dengan realitas dan langkah untuk membuktikannya dengan memilih komponen-komponennya dan menentukannya baik mengenai waktu, ruang, dan materinya, kemudian akhirnya menginterpretasikannya, semuanya itu selalu dibarengi dengan keterlibatan faktor subjektif dan berbagai bentuknya, yang paling penting adalah keterlibatan teori yang menjadi landasan proses ini " .

Selain persoalan pemilihan realitas-realitas yang oleh para penganut relativisme historis dipandang sebagai penopang sikap **memihak** dan jauh dari objektivitas, ada suatu persoalan lain, yaitu persoalan penentuan **sebab-sebab tepat** yang dikemukakan seorang sejarawan, pada waktu ia menginterpretasikan sejarah, sebagai kausa atau kausa-kausanya suatu peristiwa historis. Sebab, perhatian seorang sejarawan dalam menonjolkan sebab tertentu atau menguatkan kausa-kausanya tertentu atas kausa-kausanya lainnya, jelas terkandung di dalamnya gambaran *a priori* tentang pentingnya faktor-faktor tertentu, bukan faktor-faktor lainnya. Pentingnya faktor-faktor itu sendiri, yang berkecambah dalam pikiran seorang peneliti karena hukum subjektif khusus, erat kaitannya dengan seperangkat nilai-nilai yang dianutnya. Jelas, ini tidak sesuai dengan objektivitas penuh yang dikemukakan beberapa sejarawan, seperti halnya yang dikenal dalam sains.

Dari segi lain, jelas bahwa karakter materi sejarah yang digeluti para sejarawan tidak mungkin diungkapkan dengan suatu bahasa yang bisa dipandang sepenuhnya, netral atau objektif. Ini karena tindakan manusia dalam sejarah, yang menjadi objek penelitian seorang sejarawan sendiri, merupakan tindakan yang tidak mungkin bisa lepas dari unsur "nilai", baik negatif maupun positif. Realitas-realitas sejarah yang dikaji para sejarawan, seperti kemenangan, kekalahan, tipu daya, pembunuhan, kematian sebagai seorang syahid, perbaikan, dan lain-lainnya tidak mungkin bisa diuraikan dengan

bahasa yang sepenuhnya objektif dan bebas dari makna-makna yang berkaitan dengan nilai-nilai estetis dan etis.

Inilah salah satu aspek yang dikemukakan para pengkaji filsafat kritik sejarah yang berkaitan dengan keraguan terhadap objektivitas penelitian historis. Meski demikian, beberapa filosof sejarah mengemukakan tentang kemungkinan dicapainya objektivitas apabila para penulis sejarah menyadari sebab-sebab yang membuat timbulnya ketidaknetralan.

Walsh, dalam suatu kajiannya yang terinci, telah berupaya membatasi sebab-sebab yang membuat terjadinya kegagalan dalam merealisasikan objektivitas penuh penulisan sejarah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat para sejarawan ketika menginterpretasikan satu peristiwa historis. Di antara sebab-sebab itu ialah **kecenderungan** atau **ketidaksenangan** pribadi seorang sejarawan terhadap suatu kelas atau kelompok tertentu. Adakalanya seorang sejarawan adalah termasuk pengagum para pahlawan menghargai peran mereka dalam sejarah dan terkadang sebaliknya. Jelas, dalam kasus yang pertama sang sejarawan akan berupaya memusatkan peristiwa-peristiwa historis di sekitar para pahlawannya dan peran menentukan mereka di dalamnya. Sementara dalam kasus yang kedua sang sejarawan berupaya untuk menunjuk bahwa para pahlawan itu sendiri merupakan simbol tipu daya kelicikan, keraguan, dan negativisme

Kecenderungan-kecenderungan pribadi ini merupakan sumber perbedaan pendapat yang terkenal di kalangan para sejarawan sehingga berbedanya hukum-hukum yang mereka berikan atas para tokoh sejarah dan berlainan pula cara mereka menyajikan dan memilih materi sejarah. Namun dalam kecenderungan-kecenderungan pribadi ini, Walsh tidak melihatnya sebagai penghalang perwujudan netral yang ingin dicapai. Sebab tentulah mudah bagi seorang sejarawan yang mampu, menurut Walsh, untuk mengetahui perasaan-perasaan subjektif dalam dirinya sendiri dan mampu untuk - apabila ia benar-benar berniat - bersikap hati-hati dan menjauhinya agar tidak terjerumus ke dalamnya, sehingga kecenderungan-kecenderungan pribadi tidak membuatnya memberikan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan realitas sejarah.

Dernikian halnya kita, para pembaca sejarah, mempunyai sikap yang sama dengan sikap para penulis sejarah itu, yang menghindari perasaan-perasaan subjektif mereka dalam menulis sejarah, dan selalu menyadari apa yang mereka lakukan pada waktu kita membaca karya mereka. Demikianlah cara Walsh dalam menghindarkan diri dari kecenderungan-kecenderungan pribadi yang menjadi penghalang terealisasinya objektivitas sejarah.

Kini mari kita beralih pada sebuah persoalan lain yang oleh banyak peneliti dipandang begitu besar dampaknya dalam membuat para sejarawan tidak mampu berpandangan objektif penuh, yaitu persoalan **afiliasi kelompok** seorang sejarawan dan kesetiaan dan simpati yang ditimbulkannya atau erat kaitan dengannya. Misalnya saja “afiliasi pada suatu bangsa, agama, kelas sosial, atau ras tertentu”. Afiliasi kolektif seorang sejarawan pada salah satu hal di atas masih mempunyai dampak yang besar atas karya banyak sejarawan. Mungkin penyebab utamanya terletak pada kontradiksi dan perselisihan yang begitu gamblang dalam interpretasi banyak sejarawan atas satu peristiwa historis. Apa yang bisa dilakukan Walsh dalam hal ini - mengenai objektivitas sejarah - hanyalah memberikan saran saja, seperti telah dikemukakan dalam hal yang berkenaan dengan kecenderungan-kecenderungan pribadi. Dalam hal ini ia mengingatkan hendaknya kita berhati-hati dan dapat mengendalikan diri pada waktu kita sedang menulis sejarah, sebagaimana ia juga mengingatkan hendaknya kita selalu menyadari dan memiliki sikap para sejarawan itu pada waktu kita menelaah karya-karya mereka. Namun perasaan afiliasi pada suatu kelompok begitu samar, sulit dikendalikan, dan jauh lebih mendominasi jiwa manusia daripada kecenderungan-kecenderungan pribadi seperti telah dikemukakan di muka. Hal ini karena kecenderungan-kecenderungan pribadi tidak lain adalah perasaan-perasaan individual khusus dan dalam jiwa ia jarang tegak di atas suatu filsafat rasional yang gamblang seperti halnya perasaan-perasaan afiliasi kelompok. Tidak diragukan lagi bahwa perasaan cinta tanah air, keyakinan agama, dan solidaritas kelas dan rasial bagi orang-orang yang memilikinya didasarkan - meski lahiriahnya bercorak intuitif - pada fondasi-fondasi yang bagi mereka tampak rasional dan khusus. Oleh karena itu, kehati-hatian para sejarawan dalam hal ini sulit bisa

teralisasi, sebab semuanya bagi para pemeluknya tampak dalam ruang lingkup logika alamiah segala sesuatu.

Selanjutnya timbul persoalan ketiga, di mana Walsh berpendapat bahwa ia mampu membebaskan diri darinya dalam upayanya untuk merealisasikan objektivitas sejarah, yaitu persoalan **teori-teori** yang kontradiktif dalam menginterpretasikan sejarah yang berakibat terjadinya perbedaan pendapat yang mencolok dalam menguraikan realitas-realitas sejarah.

Misalnya saja kita dapatkan para sejarawan Marxis mendasarkan interpretasi mereka pada “faktor ekonomis semata dengan ide-ide tentang produksi, kemajuan, dan konflik antar kelas yang erat kaitannya dengan interpretasi itu”. Sebaliknya, ada para sejarawan yang menolak interpretasi sejarah yang hanya didasarkan pada satu prinsip saja, apa pun juga bentuk prinsip ini, dan mereka berupaya menegakkan interpretasi mereka pada fondasi berbagai faktor yang kompleks dan berjaln yang saling berinteraksi sesuai dengan suatu sistem tertentu atau tidak tertentu. Interpretasi-interpretasi yang demikian itu - baik bercorak tunggal atau tidak - dengan sendirinya mengandung berbagai unsur yang ada kaitannya dengan makna sejarah dari segi bahwa interpretasi-interpretasi itu tidak hanya terbatas pada realitas-realitas yang objektif dan norma-norma logika yang ada kaitannya dengan ide kausalitas yang dikemukakan sang sejarawan, tapi interpretasi-interpretasi itu melangkah lebih jauh lagi dan berupaya memahami signifikansi umum gerak sejarah dan pertanyaan tentang nilai-nilai manusiawi dan praktis yang mendominasinya. Jadi, **hukum sejarah** menurut mereka bukan sekedar gambaran deskriptif dari pendakian ruang sejarah saja, tapi di samping itu ia juga mempunyai signifikansi khusus yang ada hubungannya dengan filsafat nilai dan justifikasi keyakinan atas kemajuan, kemakmuran, kesempurnaan, dan persamaan yang berkaitan dengannya.

Di hadapan interpretasi-interpretasi atas **gerak sejarah** yang kontradiktif ini dan teori-teori makna sejarah beraneka yang ditimbulkannya, Walsh tidak berupaya menasehati kita dengan berbagai saran yang dikemukakannya seperti di

muka, tapi ia berupaya mengemukakan kepada kita bahwa di sini kita berhadapan dengan suatu persoalan delusif. Sebab hingga kini tidak terdapat satu teori interpretasi sejarah yang bisa mengklaim dirinya sendiri sebagai **teori ilmiah final** yang benar dan harus diterima sepenuhnya seperti halnya teori-teori ilmiah dalam penelitian-penelitian tentang alam. Ini karena suatu teori akan dipandang sebagai suatu teori ilmiah dalam maknanya yang benar apabila ia ditegakkan di atas landasan eksperimental yang teliti yang mengkaji secara mendalam realitas-realitas sejarah. Jelas, para peneliti pada suatu ketika akan berhasil merealisasikan penemuan ilmiah yang diharapkan itu. Pun suatu ketika akan timbul suatu teori ilmiah yang hakiki dalam menginterpretasikan sejarah yang mampu mematahkan teori-teori sejarah. Yaitu teori-teori yang mengklaim dirinya sebagai teori-teori yang bisa dipercaya, ilmiah, sistematis, dan metodis yang tidak diragukan lagi meski ia diwarnai dengan sentimen yang tajam dan fanatisme dari para penganutnya yang setia.

Adapun jalan keluar dari problema teori-teori yang kontradiktif dalam menginterpretasikan sejarah pada masa kini bisa dilakukan dengan “mengkaji konflik sektarian dan filosofis yang ada di balik teori-teori itu”, karena masing-masing sejarawan cenderung mengkaji peristiwa-peristiwa masa lalu dengan semua pikiran sektarian dan filosofis yang dianutnya. Jelas, pemikiran-pemikiran mereka mempunyai dampak atas wawasan historisnya. Yang diharapkan ialah hendaknya seorang sejarawan menyadari sepenuhnya filsafatnya dan nilai-nilai estetis dan moral khususnya guna menghindarkan diri dari sikap yang menyimpang dalam memahami sejarah berdasarkan filsafat dan nilai-nilainya itu, sehingga dengan demikian hukum-hukum historisnya sampai sejauh yang ada diwarnai dengan objektivitas.

Dari sini Walsh menyimpulkan tentang kemungkinan dicapainya interpretasi sejarah yang objektif, yakni “apabila para sejarawan mampu melepaskan diri dari hambatan-hambatan tertentu, yaitu kecenderungan-kecenderungan pribadi mereka dan perasaan-perasaan afiliasi pada suatu kelompok, dan apabila mereka membebaskan sepenuhnya filsafat-filsafat pribadi mereka dan teori-teori dalam menginterpretasikan sejarah yang erat kaitannya dengan teori-teori itu.”

Apabila untuk terealisasinya objektivitas seorang sejarawan Walsh mengajukan syarat-syarat sulit yang demikian itu dan mengemukakan berbagai jalan keluar, maka beberapa pemikir lainnya mengemukakan tentang bisa dicapainya objektivitas di atas landasan lain, yaitu pembedaan antara realitas sejarah seperti halnya yang ada dalam sejarah dan upaya sejarawan dalam menginterpretasikannya.

White, misalnya, mengkritik para peneliti yang mencampuradukkan antara metode penelitian dalam menemukan realitas historis dan **metode justifikasi rasional** guna menginterpretasikan realitas itu secara historis. Sebab justifikasi rasional yang demikian itu kadang-kadang mengandung motivasi-motivasi sosial atau psikis bisa saja diakui atau disadari. Dengan kata lain, hendaknya para peneliti membedakan antara pengetahuan historis tentang realitas-realitas seperti halnya yang terjadi sesuai dengan arsip, dokumen, dan pikiran historis yang merupakan interpretasi pribadi atas realitas-realitas historis itu. Ini karena pada pikiran historis yang demikian itu kadang terkandung faktor-faktor personal, sosial, dan pikiran yang meliputi sang penulis sejarah dan berkaitan dengannya. Tapi penyingkapan realitas-realitas sejarah sendiri dan penelitiannya lewat berbagai dokumen dan arsip bisa diletakkan sepenuhnya di bawah logika metode ilmiah dengan objektivitas ilmiah yang ditimbulkannya.

Namun pembedaan artifisial antara logika metode historis, dan objektivitas ilmiah yang mungkin dikenakan padanya, dan sikap psikis seorang penulis sejarah, dan kondisi-kondisi personal yang bisa dikenakan padanya, ditolak oleh para penganut teori relativisme historis. Sebab dalam ilmu-ilmu kemanusiaan “realitas tidaklah terpisah dari pengetahuan tentang realitas”. Dalam bidang ini kita tidak bisa menyamakan penelitian historis dengan penelitian-penelitian dalam ilmu fisika, sebab ilmu fisika bukanlah merupakan bagian dari fenomena-fenomena alam yang hendak kita kaji seperti halnya dalam pengkajian sejarah. Hal ini karena kesadaran seorang sejarawan tentang masa lalu merupakan bagian yang menyempurnakan karya historis yang dilakukannya, sebab masa lalu manusia tidak akan ada selama ia tidak mempunyai kesadaran atas eksistensinya. Kesadaran ini sajalah yang membuat dialog antara masa lalu dan masa kini menjadi mungkin dalam karya seorang sejarawan. Dengan kata lain, dalam semua pengetahuan historis manusia

adalah objek dan pribadi dan tidak boleh tidak kita harus memulai dari manusia agar tampak jelas bagi kita realitas ilmu sejarah dan filsafatnya. “Sejarah adalah pembangkitan kembali orang-orang mati oleh orang-orang yang masih hidup dan keinginan untuk membangkitkan kembali masa lalu yang demikian ini timbul dari perhatian yang realistis atas masa kini, kesadaran dengannya, dan pemikiran mengeniannya”. Oleh karena itu, seorang sejarawan tidak bisa melepaskan diri dari masa kini dan tidak boleh melakukannya. Sebab hubungan antara masa lalu dan masa kini itu sajalah yang bisa melengkapi karyanya dengan suatu makna khusus bagi orang-orang yang sezaman dengannya dan pada saat yang sama ia sajalah yang mampu menyingkapkan realitas-realitas sejarah yang paling rinci.

Makna yang demikian itu dikemukakan pula oleh **aliran historisisme mutlak**, yang diserukan oleh **Crouzet**, di mana ia menegaskan makna filsafat, dalam kedudukannya sebagai historisisme mutlak, di atas pemikiran historis atau penulisan sejarah yang pada substansinya ditegakkan di atas kekontemporeran. Hal ini karena hukum sejarah, menurut Crouzet, bermula dari perhatian terhadap kehidupan masa kini. Demikian pula realitas sejarah masa lalu tidak boleh tidak harus diwarnai oleh semangat masa kini agar citra riilnya bisa tercerminkan. Oleh karena itu, sejarah hendaknya ditingkatkan menjadi kesadaran atas masa kini yang abadi. Malah “kehidupan dan realitas”, menurut Crouzet, “adalah sejarah dan tidak ada sesuatu yang bukan sejarah”. Jadi, “semua pengetahuan adalah pengetahuan yang bercorak historis dan setiap filsafat adalah saat metodis dalam sejarah”.

Inilah salah satu segi perbedaan pendapat yang timbul sekitar kemungkinan terealisasinya objektivitas seorang sejarawan. Namun, seperti diakui, keterbebasan seorang sejarawan dari simpati-simpatinya khususnya dan afiliasi nasionalnya sulit bisa terwujud apabila ia sedang membahas sejarah masa lalu bangsanya, kontribusinya di bidang kebudayaan, kemenangan yang diraihnya, dan kekalahan serta kemunduran yang dialaminya. Dari sinilah mengapa karya historis pada umumnya sering diwarnai dengan sikap memihak. Barangkali keutamaan yang ditimbulkan oleh kegiatan di bidang sejarah seluruhnya adalah cinta realitas dan dengan cinta inilah sejarah

menjadi ilmu pengetahuan. Dari cinta realitas inilah seorang sejarawan mengemukakan filsafat estetis, moral, dan politiknya yang khusus, membentuk bidang kultural yang menjadi poros interpretasinya atas sejarah. Cinta itu sendiri termasuk di antara hal yang membangkitkan kepercayaan pembaca yang sungguh-sungguh dan membantunya mendekatkan diri pada gambaran objektif hukum-hukum sejarah yang dibacanya.

Dalam teks berikut, yang kami jadikan penutup pasal ini - seperti yang kami lakukan pada pasal-pasal di muka - kami akan mengemukakan suatu gambaran yang erat kaitannya dengan makna yang kami kemukakan ini, yakni **filsafat estetis** dan **moral** seorang sejarawan dan hubungannya dengan **objektivitasnya**. Teks ini kami kutip dari karya Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Beginilah uraian Gottschalk:

"Karena dalam hal ini ada berbagai cara untuk menguraikan realitas-realitas sejarah maka realitas tetap merupakan landasan satu-satunya hukum atas nilai karya-karya sejarah, sebab ukuran kedua yang dipergunakan seseorang dalam menimbang karya-karya itu adalah wawasan yang terkandung dalam prinsip-prinsip filosofis seorang penulis sejarah. Jadi, seorang penulis sejarah dalam hal ini tidak bisa menghindarkan diri untuk memiliki suatu filsafat atau **tata moral**. Atas dasar ini, maka lebih baik baginya untuk mengambil filsafat atau tata moral itu secara terang-terangan dan ia harus mengakui apakah ia adalah seorang **materialis** atau **idealis**, seorang yang berpandangan **liberal** atau **konservatif**, seorang yang **meragukan** masalah-masalah keagamaan atau **mengimaninya** secara tulus, seorang yang mempercai bisa majunya kemanusiaan atau menyatakan tidak mempunyai kemanusiaan untuk mencapai kesempurnaan, seorang yang menerima psiko-analisa atau fisiko-analisa, seorang yang menerima teori interpretasi ekonomis, teknis, atau geografis yang didasarkan pada ilmu pengetahuan atau interpretasi yang didasarkan pada tuntunan Ilahi, ataukah ia adalah seorang yang berupaya mengkompromikan antara prinsip-prinsip filosofis dan moral dengan prinsip-prinsip lainnya.

Di samping itu seorang sejarawan yang tidak mempunyai prinsip-prinsip filosofis atau moral juga tidak akan memiliki landasan-landasan sebagai pengukuran perubahan atau kesinambungan, dan karenanya ia tidak bisa memberi hukum tentang perkembangan, kemunculan, kejatuhan, pertumbuhan, kemandegan, keruntuhan, kesuburan, atau kemandulan. Tanpa hukum-hukum yang demikian itu tulisan tentang sejarah tidak bisa dideskripsikan secara baik, padahal ini merupakan substansi sejarah.

Memang, dengan tiadanya perasaan tentang perkembangan, terkadang kita mendapatkan penyusunan rinci-rinci sejarah secara kronologis atau sesuai dengan judul-judul kecil yang sistematis. Namun cara ini tidak bisa menuturkan suatu kisah yang runtut tentang asal usul, pertumbuhan, keseimbangan, kemandegan, atau kemunduran.

Agar supaya seseorang bisa melihat segala sesuatu itu tumbuh, hancur, tetap dalam keadaannya, atau kejadiannya selalu berulang tanpa pertumbuhan atau kemunduran, tidak boleh tidak ia harus memiliki suatu ide tentang makna pertumbuhan atau hendaknya ia memiliki suatu filsafat tentang tujuan dan ukuran hal yang baik dan yang buruk".

DAFTAR BACAAN

- Ali, R. Moh. 1963.
Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Djakarta: Bhratara.
- Ankersmit, F.R. 1987
Refleksi tentang Sejarah; Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah (terjemahan Dick Hartoko dari *Denken over geschiedenis; een overzicht van moderne geschiedfilosofische opvattingen*). Jakarta: Gramedia.
- Anshari, H. Endang Saifuddin. 1981.
Ilmu, Filsafat dan Agama. Cetakan ke-2. Surabaya: Bina Ilmu.
- Carr, E.C., 1961
What is History. Penguin: London.
- Collingwood, R.G., 1956.
The Idea of History. Galaxy: New York.
- Galke, W.B., 1968.
Philosophy and the Historical Understanding. Second edition. New York: Schoctum Books.
- Gardiner, Patrick (ed.). 1959
Theories of History. New York: The Free Press.
- Gardiner, Patrick. 1961
The Nature of Historical Explanation. London: Oxford University Press.
- Gardiner, Patrick (ed.). 1974
The Philosophy of History. London: Oxford University Press.
- Haddoch, B.A. 1980.
An Introduction to Historical Thought. London: Edward Arnold Ltd.
- Hegel, GWF. 2003
Filsafat Sejarah (terjemahan Win Usuluddin dan Harjali dari *Introduction to the Philosophy of History*). Jogjakarta: Panta Rhei Books.
- Hockett, Homer Carey. 1963.
The Critical Method in Historical Research and Writing. New York: The Macmillan.
- al-Khudhari, Zainab. 1987.
Filsafat Sejarah Ibn Khaldun. Bandung: Pustaka
- Kuntowijoyo. 1994.
Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Left, Gordon. 1971.
History and Social Theory. New York: Anchor Books.
- Lichtman, Allen J. and Valirie French. 1978.
Historical and the Living Past. Illinois: Harlem Davidson Inc.
- Meerhoff, H., 1959
The Philosophy of History in Our Time. Anchor: New York.
- Sahakian, W.S.1968.
Outline of History of Philosophy. New York: Barnes
- ash-Shadr, Ayatullah Baqir. 1990.
Sejarah dalam Perspektif al-Quran; sebuah Analisis (terjemahan M.s. Nasrulloh dari *Trends of History in Quran*). Jakarta: Pustaka Hidayah.
- al-Sharqawi, 'Effat. 1406 H/1986 M.
Filsafat Kebudayaan Islam (terjemahan Ahmad Rofi' Usmani dari Falsafah al-Hadharah al-Islamiyyah). Bandung: Pustaka.
- Shiddiqi, Abdul Hamid. 1983 M/1403 H.
Islam dan Filsafat Sejarah (terjemahan Moh. Nabhan Husein dari *Tafsir al-Taariikh*). Jakarta: Media Da'wah.
- Tafsir, Ahmad. 2004.
Filsafat Umum; Akal dan Hati sejak Tales sampai Capra. Edisi revisi. Bandung: Rosda Karya.
- Teggart, Frederick J. Frederick. 1960.
Theory and Process of History. Berkeley and Los Angels: University of California Press.
- Suriasumantri, Jujur S. 1985.
Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Harapan.
- Carr, E.C., 1961
What is History. Penguin: London.
- Walsh, R.H. (ed.). 1969.
Ideas of History; Speculative Approaches to History. Vol. I. New York: E.P. Dutton & Co., Inc.
- Walsh, R.H. (ed.). 1969.
Ideas of History; The Critical Philosophy of History. Vol. II. New York: E.P. Dutton & Co., Inc.